



BerAKHLAK
BerAKHLAK adalah komitmen untuk berperilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berkeadilan.

**#bangga
melayani
bangsa**

AMN
ADMINISTRASI MUDAH LURAH TERAKAN

**#KOLABORASI
BANGUN
NEGERI**

LAPORAN HASIL EVALUASI

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

PERANGKAT DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2026

DINAS PERTANAHAN

**INSPEKTORAT DAERAH
KOTA PEKANBARU
TAHUN 2026**



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Gedung Lontiok. Lt. 3
Pekanbaru Riau, 28292 Laman : Inspektorat.pekanbaru.go.id

Pekanbaru, 20 April 2026

Nomor : B.700/INSP-IRBAN II/5/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Dinas Pertanahan
Tahun 2026

Yth. Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru
di
Pekanbaru

Berikut kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun 2026 pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, dengan uraian sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- b. Keputusan Walikota Pekanbaru nomor 280 tahun 2026 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2026;
- c. Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat nomor : B.700/INSP-UMUM/55/2026 tanggal 06 April Tahun 2026 perihal melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah tahun 2026

2. Tujuan

- a. Informasi pelaksanaan AKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah;
- b. Informasi implementasi AKIP;
- c. Nilai implementasi AKIP;
- d. Nilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- e. Saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- f. Monitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

3. Ruang Lingkup

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta Upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan Implementasi AKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja dan
- e. Penilaian capaian kinerja atau output ataupun outcome serta kinerja lainnya.

4. Metodologi

Evaluasi AKIP menggunakan metodologi kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan, kemanfaatan, tujuan evaluasi, waktu penugasan, serta kendala yang ada, dan memadukannya

dengan metodologi kualitatif berdasarkan professional judgement evaluator.

5. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi LHE AKIP Tahun 2025, Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut;

- a. Jumlah rekomendasi tahun sebelumnya adalah 5
- b. Jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti adalah 2
- c. Jumlah rekomendasi tindak lanjut yang berstatus “Sudah Sesuai Rekomendasi (SSR)” adalah 2 dari 5 yang ditindak lanjuti

II. HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru** menunjukkan bahwa nilai sebesar **68,90** dengan predikat **“B”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Baik”**, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada sepertiga unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu sedikit adanya perbaikan pada unit kerja dan komitmen dalam manajemen kinerjanya. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level pimpinan tertinggi. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,20
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,90
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	11,75
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	68,90
Tingkat akuntabilitas Kinerja (Predikat)		B	

Sumber : Kertas Kerja Evaluasi AKIP 2026

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada **Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru** tahun 2026 sebagai berikut:

1. Evaluasi Terhadap Komponen Perencanaan Kinerja

Dari evaluasi diketahui bahwa perencanaan kinerja memiliki kelemahan antara lain:

- a. Renstra belum diformalkan sehingga secara administratif belum sah dan belum dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran
- b. Renstra menyebutkan ada permasalahan dan isu strategis, tapi disajikan masih cenderung bersifat deskriptif dan umum, serta belum sepenuhnya didukung oleh analisis yang mendalam dan berbasis data kinerja sehingga belum dapat disimpulkan permasalahan dan isu strategisnya.

2. Evaluasi Terhadap Komponen Pengukuran Kinerja

Dari evaluasi diketahui bahwa pengukuran kinerja memiliki kelemahan antara lain:

- a. Belum menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengukuran data kinerja;
- b. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;

3. Evaluasi Terhadap Komponen Pelaporan Kinerja

Dari evaluasi terhadap komponen Pelaporan kinerja, perlu ditingkatkan antara lain :

- a. Belum terdapat laporan kinerja secara berkala;
- b. Sistematis LKjIP tahun 2025 masih belum sepenuhnya sesuai Permenpan 53 tahun 2014;

4. Evaluasi Terhadap Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari evaluasi diketahui bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja memiliki kelemahan antara lain:

- a. Masih terdapat rekomendasi evaluasi AKIP tahun 2025 yang belum ditindaklanjuti.

III. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa nilai sebesar **68,90** dengan predikat **"B"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Baik"**, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada sepertiga unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu sedikit adanya perbaikan pada unit kerja dan komitmen dalam manajemen kinerjanya. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level pimpinan tertinggi.

2. Rekomendasi

a. Komponen Perencanaan Kinerja

Agar segera memformalkan dokumen Renstra sehingga sah secara administratif dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran, serta melakukan penyempurnaan penyajian permasalahan dan isu strategis dengan didukung analisis yang memadai dan berbasis data kinerja agar dapat menggambarkan kondisi secara jelas dan terukur.

b. Komponen Pengukuran Kinerja

- Menyusun mekanisme/Standar Operasional Prosedur (SOP) pengukuran data kinerja;

- Menjadikan Pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan yang ditetapkan melalui keputusan pimpinan organisasi.
- c. Komponen Pelaporan Kinerja
- Menyusun laporan kinerja secara berkala;
 - Menyusun Sistematis LKjIP tahun 2025 sepenuhnya sesuai Permenpan 53 tahun 2014.
- d. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- Menyusun rencana tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), termasuk rekomendasi evaluasi tahun-tahun sebelumnya yang masih belum tuntas ditindaklanjuti, dan melaksanakannya

Demikianlah disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP dilingkungan **Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru**. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami menghargai agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

PEKANBARU, 20 April 2026
INSPEKTUR DAERAH
KOTA PEKANBARU



Dr. Tr. H. ZULHELMI ARIFIN, S. STP., M.Si
NIP. 19810719 199912 1 001